

Judul : Program SPHP, DPR: harga pangan terkendali
Tanggal : Sabtu, 17 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Program SPHP Diperpanjang

DPR: Harga Pangan Terkendali

Senayan menyambut baik keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) alokasi 2025 hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras, di tengah potensi gejolak harga pada awal tahun.

ANGGOTA Komisi IV DPR Eko Wahyudi menilai, beras SPHP sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, beras merupakan komoditas pangan utama yang sangat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.

"Perpanjangan penyaluran beras SPHP mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat," ujar Eko dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Menurut Eko, momentum pergantian tahun biasanya diiringi kenaikan harga beras akibat gangguan distribusi dan meningkatnya permintaan. Sehingga, intervensi Pemerintah melalui SPHP masih sangat dibutuhkan.

"Perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar, sekaligus menahan lonjakan harga di pasar," kata dia.

Eko bilang, kebijakan ini harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi

dengan baik agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Mengingat keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas stabilisasi harga.

Karena itu, Bulog dan instansi terkait untuk memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP 2025 selama periode perpanjangan ini. "Komisi IV DPR selalu menekankan agar distribusi SPHP tidak tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal," tegasnya.

Selain itu, Eko menilai, perpanjangan SPHP memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan sekaligus membantu Pemerintah menjaga inflasi pangan.

"Tapi kebijakan ini tetap harus memperhatikan kepentingan petani, sehingga stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak merugikan harga gabah di tingkat



Eko Wahyudi

produsen," kata dia menekankan.

Program beras SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal jangka panjang. Pemerintah harus terus memperkuat produksi pangan nasional, memperbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi. "SPHP adalah instrumen penting dalam kondisi tertentu," imbuhnya.

Dia menegaskan ketahanan pangan sejati hanya bisa dicapai jika produksi kuat, distribusi efisien, dan petani sejahtera. "Kami akan terus mengawal kebijakan pangan agar benar-benar berpihak pada rakyat," tandasnya.

Sementara, Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, perpanjangan itu memberi ruang bagi penyaluran sisa alokasi beras SPHP 2025 yang belum tersalurkan. Harapannya, beras tersebut dapat terjual di berbagai lini pasar dan dapat lebih mudah ditemui masyarakat.

"Selanjutnya mulai bulan Februari, sudah ada alokasi beras SPHP untuk 2026 sebesar 1,5 juta ton," ujar Sarwo di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Dengan itu, tidak ada jeda penyaluran beras untuk masyarakat. Sehingga beras SPHP senantiasa hadir bagi masyarakat Indonesia sebagai pilihan konsumsi dengan harga yang terjangkau.

Sarwo menegaskan, konsistensi penyaluran beras SPHP ini penting untuk memberi efek penekan ke harga beras umum di pasaran. Dalam Panel Harga Pangan Bapanas mulai terlihat pergerakan rerata harga beras medium secara nasional, meskipun masih berada tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12 ribu/kg. Sedangkan harga beras SPHP adalah Rp 11 ribu/kg.

Ia menambahkan, stabilitas harga tersebut turut ditopang oleh proyeksi peningkatan produksi beras nasional menjelang panen raya. Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, produksi

beras pada Januari diperkirakan mencapai 1,79 juta ton dan meningkat menjadi 2,98 juta ton pada Februari.

"Sementara puncak panen raya diperkirakan di Maret dan April yang dapat mencapai hingga 5 juta ton untuk masing-masing bulannya," ucap Sarwo.

Sarwo mengatakan, pihaknya sedang menggodok pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP tahun 2026 dengan memperlebar batas maksimal pembelian beras SPHP. Semula batas maksimal pembelian berada di 2 pak per konsumen atau 10 kilogram (kg). Ke depan direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg.

Sebagai informasi, selama bulan Januari 2026 ini masyarakat masih dapat merasakan kehadiran beras SPHP di pasaran. SPHP beras tahun 2025 dapat dilanjutkan hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Berkat itu, realisasi penjualan beras SPHP tahun 2025 telah meningkat sekitar 10 ribu ton di awal Januari ini. SPHP beras tahun 2025 sudah kembali dikebut sejak 5 Januari 2026. Sampai 12 Januari 2026 total realisasi telah berada di angka 813 ribu ton. ■ TIF